

KOMPOSISI BELANJA PENDIDIKAN DAERAH DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI: STUDI EMPIRIS DATA PANEL JAWA BARAT

Novi Rahyanti¹⁾, Rido Parulian Panjaitan²⁾

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat¹⁾
Program Studi Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN,
Kementerian Keuangan RI, Tangerang Selatan²⁾
e-mail: novi.rahyanti@gmail.com¹⁾, rido.panjaitan@pknstan.ac.id²⁾

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang membutuhkan dukungan belanja publik yang efektif. Namun, besarnya alokasi belanja pendidikan daerah belum tentu diikuti oleh peningkatan capaian partisipasi sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komposisi belanja fungsi pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Common Effect Model pada 27 kabupaten/kota selama periode 2022–2024. Variabel independen utama terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja hibah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dimasukkan sebagai variabel kontrol. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya belanja pegawai yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap APM SMP. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja pendidikan daerah lebih ditentukan oleh struktur dan prioritas alokasi belanja, khususnya pembiayaan tenaga pendidik, dibandingkan dengan belanja operasional dan belanja fisik dalam jangka pendek. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menegaskan pentingnya analisis komposisi belanja fungsi pendidikan dalam mengevaluasi kinerja pendidikan daerah. Dengan demikian, maka penganggaran belanja fungsi pendidikan sebaiknya tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban besaran alokasi belanja (mandatory spending) tetapi juga memperhatikan komposisi, kualitas dan arah lokasi belanja fungsi pendidikan itu sendiri.

Kata kunci: *Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Angka Partisipasi Murni*

Abstract

Basic education is a mandatory public service which needs an effective government expenditure. Nevertheless, the amount of government expenditure budget on education may not affect the surge of school participation. This research aims to analyze the effect of education public expenditure's structure on Net Enrollment Rate of Secondary School in West Java by using Common Effect Model of 27 municipalities in the period 2022-2024. The main independent variables are personnel expenditure, goods and services expenditure, capital expenditure and grants expenditure, in addition Physical and Non-Physical Special Allocation Funds as well as poverty as controlling variables. The results illustrates that only personnel expenditure positively significant affected Net Enrolment Rate of Secondary School. These findings indicate that in the short term, the effectiveness of education expenditure was more likely depends on the expenditure's structure and priority, especially for teachers' expenses rather than operational and capital expenses. Thus, this research gave empirical contribution which affirmed the importance of analyzing the structure of education expenditure for evaluating the education service performance. All in all, the budgeting of education expenditure should not only to fulfil mandatory spending but also to focus on the structure, quality and allocation priority of the education expenditure itself.

Keywords: Education Function Expenditure, Personnel Expenditure, Goods and Services Expenditure, Capital Expenditure, Net Enrollment Rate.

1. PENDAHULUAN

Meskipun pendidikan bukan merupakan barang publik yang murni, tetapi pemerintah di mayoritas negara tetap mengambil peran dalam penyediaan pendidikan mengingat adanya berbagai eksternalitas positif yang dapat menimbulkan kegagalan pasar pendidikan (Gruber, 2019). Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap pendidikan tercermin melalui kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun yang mewajibkan seluruh penduduk usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar berada pada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana hal ini sesuai dengan model Tiebout dimana untuk penyediaan barang publik berskala lokal hendaknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong persaingan dalam penyediaan barang publik yang lebih baik (Gruber, 2019). Konsekuensinya, efektivitas belanja pendidikan daerah menjadi faktor kunci dalam pencapaian target partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.

Namun demikian, efektivitas belanja pendidikan masih menjadi tantangan. Salah satunya dapat dilihat pada konteks di Jawa Barat yang cukup menarik perhatian. Secara agregat, wilayah Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki alokasi belanja pendidikan yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota secara agregat di Jawa Barat mencapai 32,433 Trilyun Rupiah. Namun demikian, belanja yang cukup besar ini masih belum mampu menyelesaikan target-target kinerja pendidikan yang ada. Meskipun Jawa Barat memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu 95,86% untuk usia 13-15 tahun (usia Sekolah Menengah Pertama atau sederajat), Angka Partisipasi Sekolah ini masih lebih rendah daripada APS Nasional, yaitu 96,17% (Lihat Gambar 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak selalu diikuti dengan peningkatan target atau hasil yang diharapkan. Dengan demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan komposisi belanja pendidikan daerah.



Sumber: diolah dari Data Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun 10 Provinsi Tertinggi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024

Dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, belanja pendidikan daerah tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dari transfer pemerintah pusat, salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. DAK ini dirancang untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan DAK berpotensi mempengaruhi efektivitas belanja pendidikan daerah dalam mendorong peningkatan partisipasi sekolah, baik secara langsung maupun melalui penguatan kapasitas layanan pendidikan.

Sejumlah penelitian empiris telah mengkaji pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, baik di tingkat internasional maupun nasional. Penelitian yang menguji secara empiris pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di berbagai negara telah beberapa kali dilakukan, seperti penelitian oleh Beri et al. (2025) di negara-negara low and middle income, Hajebi et al. (2023) di negara-negara OECD dan Hota (2023) di Odisha, India. Untuk studi empiris di Indonesia sendiri, penelitian serupa telah dilakukan oleh Ruwandari dan Suharlina (2023) di Kalimantan Barat, Aulia dan Yulhendri (2020) di Sumatera Barat dan Yanti, Imtikhanah dan Fatah (2023) di Jawa Tengah.

Namun demikian, penelitian-penelitian ini masih menguji belanja pendidikan secara agregat terhadap Angka Partisipasi Sekolah yang belum memilah jenis belanja tersebut secara lebih detail. Selain itu, terdapat penelitian seperti yang dilakukan oleh Bui et al. (2020) yang menggunakan secara spesifik belanja subsidi pendidikan dan penelitian Haikal dan Rahmadiani (2025) yang menggunakan belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sektor pendidikan untuk menguji dampak belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah. Namun demikian konteks yang digunakan belum mengerucut untuk kasus di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang dan studi-studi sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena masih rendahnya angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun di Jawa Barat meskipun anggaran belanja fungsi pendidikan yang dialokasikan sudah cukup besar dengan mempertimbangkan aspek kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penelitian ini, pertanyaan tentang “bagaimana pengaruh belanja pendidikan berdasarkan jenis belanjanya yaitu belanja pegawai fungsi pendidikan, belanja barang jasa fungsi pendidikan, belanja modal fungsi pendidikan, dan belanja hibah fungsi pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan variabel pengendali Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendidikan serta Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat dari tahun 2022 sampai dengan 2024?” dapat terjawab. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pengalokasian belanja fungsi pendidikan yang lebih efektif.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keuangan Publik (*Theory of Public Finance*)

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), keuangan publik menjelaskan bagaimana pemerintah melalui kebijakan fiskal memperoleh sumber daya, mengalokasikan penggunaan sumber daya tersebut serta mempengaruhi perekonomian negara. Keuangan publik memperlihatkan intervensi pemerintah dalam memperbaiki kegagalan pasar sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial. Keuangan publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1) Fungsi Alokasi (*Allocation Function*)

Dalam kondisi pasar gagal untuk menyediakan barang publik, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk memastikan ketersediaan barang publik tersebut untuk masyarakat serta mengatasi dampak eksternalitasnya.

2) Fungsi Distribusi (*Distribution Function*)

Pemerintah berperan dalam mendistribusi kesejahteraan secara merata kepada masyarakat. Mekanisme pasar cenderung akan menghasilkan ketimpangan pendapatan akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan faktor produksi. Pemerataan melalui pemberlakuan pajak sebagai sumber dana untuk berbagai program penyediaan barang publik didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi.

3) Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Function*)

Kebijakan keuangan publik dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi fluktuasi siklus ekonomi, seperti dengan meningkatkan belanja atau menurunkan pajak saat terjadi resesi, ataupun sebaliknya mengurangi belanja atau menaikkan pajak saat tingkat inflasi melonjak.

Pada prakteknya, ketiga fungsi ini tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga harus dijalankan secara bersamaan.

Belanja Fungsi Pendidikan

Belanja fungsi pendidikan adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk urusan pendidikan, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pengalokasian belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan fungsi pendidikan sebagai pelayanan dasar pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menetapkan besaran minimal yaitu 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mendukung urusan pendidikan di luar kewenangan sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan telah terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi sendiri, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pada fungsi pendidikan, jenis-jenis belanja yang muncul antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas bulan), termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah, misalkan untuk bantuan operasional untuk sekolah swasta.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam konteks fungsi pendidikan, belanja bantuan sosial dianggarkan antara lain untuk pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi atau yang kurang mampu.

Angka Partisipasi Murni

Partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan layanan pendidikan oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur capaian partisipasi pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM), yang merefleksikan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka Partisipasi Murni tingkat SMP/Sederajat menggambarkan penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengenyam pendidikan SMP/Sederajat. Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni menandakan semakin banyak populasi penduduk yang bersekolah sesuai dengan standar usia jenjang pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2025). Oleh karena itu, Angka Partisipasi Murni menjadi indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Kajian Empiris

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai dipandang sebagai prasyarat untuk menjamin ketersediaan layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, hasil-hasil empiris terkait hubungan antara belanja pendidikan dan capaian partisipasi sekolah menunjukkan temuan yang beragam.

Penelitian yang menguji secara empiris pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah telah dilakukan di berbagai negara. Penelitian-penelitian ini pada umumnya membuktikan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah. Penelitian oleh Beri et al. (2025) membuktikan bahwa belanja pemerintah dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di negara-negara *low and*

middle income. Hal serupa juga terjadi di negara-negara OECD (Hajebi et al., 2023). Lebih lanjut, menurut Hota (2023), belanja pendidikan selain dapat meningkatkan partisipasi sekolah juga berdampak pada pembangunan ekonomi di Odisha, India.

Di beberapa daerah di Indonesia, penelitian oleh Ruwandari dan Suharlina (2023) telah menemukan bahwa belanja pendidikan telah berdampak positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Barat. Sementara Aulia dan Yulhendri (2020) membuktikan bahwa belanja pendidikan, jumlah guru dan jumlah kelas berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat. Penelitian Yanti, Imtikhanah dan Fatah (2023) juga telah membuktikan bahwa belanja pendidikan, jumlah guru dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Tengah. Penelitian lebih mendalam atas jenis belanja pendidikan secara spesifik, telah membuktikan jenis-jenis belanja yang mendorong angka partisipasi sekolah. Penelitian Bui et al. (2020) membuktikan bahwa biaya pendidikan melalui subsidi pemerintah dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Vietnam. Sementara, Haikal dan Rahmadiani (2025) telah menemukan bahwa belanja pegawai fungsi pendidikan telah berdampak negatif terhadap Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kalimantan Barat.

Variasi temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas belanja pendidikan tidak seragam. Pendekatan yang melihat belanja pendidikan sebagai satu kesatuan agregat cenderung mengabaikan perbedaan karakteristik dan mekanisme dampak antar jenis belanja. Padahal, setiap jenis belanja dalam fungsi pendidikan memiliki tujuan, pola penggunaan, serta horizon dampak yang berbeda terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dalam literatur keuangan publik dan ekonomi pendidikan, belanja pegawai sering dikaitkan dengan keberlanjutan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan keberlangsungan layanan pendidikan. Sementara itu, belanja barang dan jasa umumnya berkaitan dengan operasional pendidikan, belanja modal berhubungan dengan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan yang bersifat jangka menengah dan panjang, sedangkan belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih selektif dan tidak selalu berulang. Perbedaan karakteristik tersebut mengimplikasikan bahwa dampak masing-masing jenis belanja terhadap APM dapat berbeda antar daerah dan antar periode waktu.

Meskipun demikian, kajian empiris yang secara eksplisit membedakan pengaruh jenis belanja fungsi pendidikan terhadap APM, khususnya pada tingkat pemerintah daerah, masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan peran transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam menjelaskan kinerja pendidikan daerah, tanpa secara mendalam mengkaji bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan belanja pendidikan dalam kewenangannya sendiri. Padahal, struktur dan prioritas belanja pendidikan daerah berpotensi menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada pengaruh belanja fungsi pendidikan berdasarkan jenis belanja terhadap Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Jawa Barat. Dengan menempatkan Hibah dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel pengendali dan menggunakan pendekatan data panel pada tingkat kabupaten/kota, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran komposisi belanja pendidikan daerah dalam memengaruhi capaian partisipasi sekolah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait efektivitas belanja pendidikan daerah serta memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan penganggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan beberapa latar belakang dan kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya, maka artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel untuk menguji pengaruh belanja fungsi pendidikan berdasarkan jenis belanja terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Jawa Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan cakupan 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pemilihan periode penelitian tersebut didasarkan pada ketersediaan dan konsistensi data anggaran serta indikator pendidikan antar daerah, sehingga memungkinkan perbandingan yang relatif stabil antar kabupaten/kota.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah APM jenjang Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, yang menggambarkan proporsi penduduk usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. APM dipilih sebagai indikator utama karena dinilai lebih tepat dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar dibandingkan APS, mengingat APM menekankan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/ Sederajat dipilih karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan belanja pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Variabel independen utama dalam penelitian ini adalah belanja fungsi pendidikan berdasarkan jenis belanjanya, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, dan belanja hibah. Keempat jenis belanja tersebut merepresentasikan instrumen kebijakan penganggaran pendidikan daerah yang memiliki karakteristik dan mekanisme pengaruh yang berbeda terhadap *outcome* pendidikan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana masing-masing jenis belanja fungsi pendidikan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan APM jenjang SMP pada tingkat kabupaten/kota.

Selain variabel utama tersebut, penelitian ini juga memasukkan DAK Fisik dan DAK Non Fisik bidang pendidikan serta kemiskinan sebagai variabel kontrol. DAK diperlakukan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh dana transfer pemerintah pusat yang bersifat spesifik dan terikat, sehingga pengaruh belanja fungsi pendidikan daerah terhadap APM dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Dengan memasukkan DAK sebagai variabel kontrol, penelitian ini berupaya memisahkan pengaruh belanja pendidikan yang bersumber dari kebijakan penganggaran daerah dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Sementara itu, variabel sosial ekonomi kemiskinan dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk meminimalkan bias sekaligus memperkuat validitas kausalitas model.

Adapun persamaan model yang digunakan adalah regresi atas belanja pegawai fungsi pendidikan, belanja barang jasa fungsi pendidikan, belanja modal fungsi pendidikan, dan belanja hibah fungsi pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan variabel pengendali Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendidikan serta variabel sosial-ekonomi Indeks Kedalaman Kemiskinan, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} APM_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(Edu_Peg)_{it} + \beta_2 \text{Log}(Edu_Barjas)_{it} + \beta_3 \text{Log}(Edu_Modal)_{it} \\ & + \beta_4 \text{Edu_Hibah}_{it} + \beta_5 \text{DAKF}_{it} + \beta_6 \text{Log}(\text{DAKNF})_{it} \\ & + \beta_7 \text{Kemiskinan}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \tag{1}$$

Keterangan:

<i>APM</i>	: Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/Sederajat
<i>Log (Edu_Peg)</i>	: Log Belanja Pegawai Fungsi Pendidikan
<i>Log (Edu_Barjas)</i>	: Log Belanja Barang Jasa Fungsi Pendidikan
<i>Log (Edu_Modal)</i>	: Log Belanja Modal Fungsi Pendidikan
<i>Edu_Hibah</i>	: Belanja Hibah Fungsi Pendidikan
<i>DAKF</i>	: Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan
<i>Log (DAKNF)</i>	: Log Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan
<i>Kemiskinan</i>	: Indeks Kedalaman Kemiskinan
β_0	: koefisien konstan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$: koefisien regresi
ε	: <i>error term</i>
<i>i</i>	: kabupaten/kota
<i>t</i>	: tahun

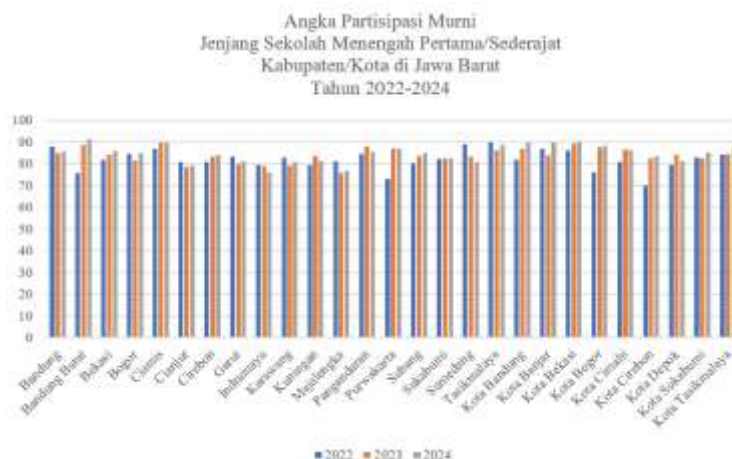
Untuk menentukan metode estimasi data panel yang paling sesuai, dilakukan uji *Chow* dan uji *Hausman* untuk memilih antara model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Hausman*, model *common effect (CEM)* dipilih sebagai metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pengujian statistik dilakukan melalui uji parsial (uji *t*) untuk mengetahui pengaruh masing-masing jenis belanja fungsi pendidikan terhadap *APM*, serta uji simultan (uji *F*) untuk menilai pengaruh variabel-variabel dalam model secara bersama-sama. Untuk memastikan validitas model, dilakukan pula uji asumsi klasik yang relevan dengan pendekatan *common effect*, yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas.

Data belanja fungsi pendidikan dan *DAK* diperoleh dari Lampiran 1.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBD*) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan Angka Partisipasi Murni dan Indeks Kedalaman Kemiskinan diambil dari data statistik pendidikan Badan Pusat Statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

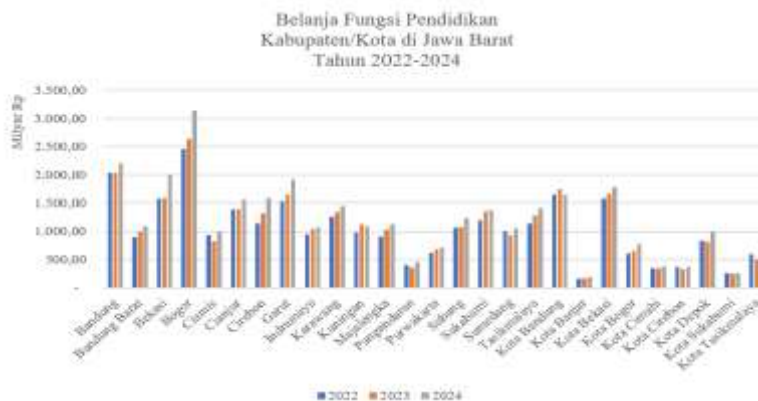
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2025), Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi terutama terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 di beberapa Kabupaten/Kota, seperti: Bandung Barat, Purwakarta, Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Cirebon menunjukkan fase pemulihan dari pandemi *Covid-19*. Setelah periode tersebut, peningkatan tetap terjadi, namun tidak terlalu besar. Rata-rata kenaikan Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Jawa Barat adalah 1,84%. Hal menarik adalah, beberapa Kabupaten/Kota justru mengalami trend penurunan, seperti: Indramayu dan Sumedang (Lihat gambar 2). Fenomena ini memperkuat urgensi penelitian terkait Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Jawa Barat.



Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 2. Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022-2024

Kondisi peningkatan yang tidak terlalu besar ini kurang sejalan dengan kondisi peningkatan belanja fungsi pendidikan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang naik cukup besar. Berdasarkan Lampiran 1.1 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2022, 2023, 2024), Belanja Fungsi Pendidikan naik rata-rata 7,24% setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan tertinggi pada Belanja Hibah sebesar 405,9%, disusul oleh Belanja Modal dengan rata-rata kenaikan 41,96% dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai dengan rata-rata kenaikan masing-masing 5,52% dan 5,37% (Lihat Gambar 3).



Sumber: diolah dari Lampiran 1.1 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2022, 2023, 2024)

Gambar 3. Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022-2024

Proporsi Belanja Fungsi Pendidikan sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai sebesar rata-rata 62,66% disusul oleh Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata 19,96%, Belanja Modal dengan rata-rata 10,54%, Belanja Hibah dengan rata-rata 6,53% dan sisanya Belanja Bantuan Sosial (Lihat Gambar 4).



Sumber: diolah dari Lampiran 1.1 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2022, 2023, 2024)

Gambar 4. Rata-rata Komposisi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022-2024

Sebelum menganalisis pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat, perlu dilakukan terlebih dahulu analisis deskriptif atas variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Belanja Pegawai	Belanja Barjas	Belanja Modal	Belanja Hibah	APM
Mean	666.302.796.013	230.298.273.776	124.020.639.555	80.396.287.466	83,55975
Median	710.663.038.603	182.895.676.952	113.485.038.081	42.466.667.400	83,65
Standar Deviation	314.421.624.128	157.694.849.664	108.623.401.362	92.862.048.962	4,251372
Minimum	122.713.849.451	24.528.464.806	2.313.930.400	0	69,93
Maximum	1.259.774.730.837	671.194.210.759	757.104.573.237	458.030.704.321	91,39

Sumber: diolah dari output EViews (2025)

Berdasarkan tabel analisis deskriptif, Belanja Pegawai menjadi porsi belanja fungsi pendidikan yang terbesar dengan rata-rata Rp666,3 Milyar, disusul oleh Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata Rp230,3Milyar. Namun demikian, kedua belanja ini juga memiliki ketimpangan antar daerah yang cukup besar. Belanja pegawai dengan standar deviasi Rp314,4Milyar dan belanja barang dan jasa dengan standar deviasi Rp157,7Milyar. Belanja Modal memiliki proporsi yang lebih kecil daripada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yaitu dengan rata-rata Rp124,02Milyar dengan standar deviasi Rp108,6Milyar. Standar Deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah dalam pengalokasian Belanja Fungsi Pendidikan di Jawa Barat.

Untuk menentukan metode regresi data panel yang terbaik, dilakukan terlebih dahulu uji chow dan uji hausman. Berdasarkan uji chow, didapatkan hasil *PValue* sebesar 0,0741 atau lebih besar dari 0,05 sehingga metode *Common Effect (CEM)* lebih dipilih daripada metode *Fixed Effect (FEM)* dan tidak perlu dilanjutkan dengan uji hausman.

Tabel 2. Uji Chow

	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	1,620451	(26, 47)	0,0741
Cross-section Chi-Square	51,837386	26	0,0019

Sumber: diolah dari output EViews (2025)

Setelah menentukan metode regresi data panel yang terbaik, dilakukan uji statistik parsial (*t-test*), Berdasarkan uji statistik parsial didapatkan bahwa pada tingkat signifikansi 10%, hanya Belanja Pegawai yang berdampak positif secara signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat Tahun 2022-2024. Sementara variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat Tahun 2022-2024. Adapun hasil permodelan yang didapat sebagai berikut:

$$APM_{it} = 62,3003 + 0,9248 \text{ Log}(Edu_Peg)_{it} - 0,1453 \text{ Log}(Edu_Barjas)_{it} + 0,0801 \text{ Log}(Edu_Modal)_{it} - 0,0000 \text{ Edu_Hibah}_{it} - 0,0000 \text{ DAKF}_{it} - 0,2276 \text{ Log}(DAKNF)_{it} - 2,6480 \text{ Kemiskinan}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

	B	Std.Error	t-Statistic	Prob
Constant	62,30033	14,64454	4,254168	0,0001
Log (Edu_Peg)	0,924768	0,453948	2,037165	0,0453 ^{*)}
Log (Edu_Barjas)	-0,145258	0,134082	-1,083355	0,2822
Log (Edu_Modal)	0,080071	0,094778	0,844825	0,4010
Edu_Hibah	-3,37E-17	4,92E-17	-0,785088	0,4349
DAKF	1,10E-11	2,27E-11	0,500223	0,6184
Log (DAKNF)	-0,227644	0,158009	-1,440696	0,1539
Kemiskinan	-2,647979	0,969399	-2,731569	0,0079 ^{*)}

Dependent Variable: Angka Partisipasi Murni (APM)
***) Signifikan untuk tingkat signifikansi 5%**

Sumber: diolah dari output EViews (2025)

Dalam uji statistik simultan (*F-test*) didapatkan hasil bahwa pada tingkat signifikansi 5%, secara bersama-sama, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah dan variabel pengendali DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Tahun 2022-2024 di Jawa Barat.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

	Value	d.f	Prob
F-statistic	2,483711	(7,73)	0,0241
Chi-square	17,38598	7	0,0151

Sumber: diolah dari output EViews (2025)

Untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan dalam analisis ini terjaga kualitasnya dan terhindar dari bias, maka dilakukanlah beberapa uji asumsi klasik. Untuk regresi yang menggunakan data panel dengan metode Random Effect Model, uji asumsi klasik yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Untuk menunjukkan bahwa data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka dilakukan uji Jarque-Bera. Berdasarkan hasil uji, didapatkan bahwa nilai probability 0,186462 atau lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.



Sumber: diolah dari output EViews (2025)

Gambar 5. Uji Normalitas Model Penelitian

2) Uji Multikolinearitas

Untuk menunjukkan kemungkinan terjadi masalah multikolinearitas, perlu diketahui hubungan antar variabel dalam sistem persamaan dengan uji Variance Inflation Factors (VIF). Berdasarkan hasil uji, didapatkan bahwa nilai VIF kurang dari 10. Hal ini

menandakan bahwa dalam model ini tidak terdapat permasalahan multikolinearitas antar variabel yang digunakan.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	Coeff. Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Log (Edu_Peg)	0,246850	1925,875	1,838144
Log (Edu_Barjas)	0,016140	105,8503	2,498375
Log (Edu_Modal)	0,008073	43,60583	1,720371
Edu_Hibah	2,36E-33	1,613160	1,304570
DAKF	4,67E-22	4,226145	1,603527
Log (DAKNF)	0,034745	258,5756	1,625141
Kemiskinan	1,131368	10,75596	1,318358

Sumber: diolah dari output EViews (2025)

Pembahasan

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model (CEM)* menunjukkan bahwa pengaruh belanja fungsi pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Jawa Barat bervariasi menurut jenis belanjanya. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya belanja pendidikan secara agregat tidak serta-merta menjamin peningkatan partisipasi sekolah, melainkan sangat ditentukan oleh komposisi belanja yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Belanja Fungsi Pendidikan di Jawa Barat masih didominasi oleh Belanja Pegawai. Berdasarkan hasil uji parsial, Belanja Pegawai di Jawa Barat berdampak positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat. Hasil ini tidak sejalan dengan kajian empiris di Kalimantan Barat yang justru menunjukkan bahwa Belanja Pegawai justru berdampak negatif signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat (Haikal dan Rahmadiani, 2025). Temuan ini sejalan dengan teori keuangan publik yang menekankan peran kualitas dan ketersediaan input pelayanan publik dalam menentukan *outcome* layanan dasar. Dalam konteks pendidikan dasar, keberadaan guru yang memadai secara jumlah dan kompetensi merupakan faktor kunci dalam memastikan akses dan keberlanjutan partisipasi peserta didik. Kondisi dapat dijelaskan dengan beberapa faktor berikut ini, yaitu:

- 1) Belanja Pegawai di Jawa Barat telah diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, dimana pada tahun 2023 kualifikasi pendidik untuk jenjang SMP di Jawa Barat sebesar 97,4% merupakan lulusan D4/S1 dan sudah bersertifikasi sebesar 35,4%. Sementara di Kalimantan Barat kualifikasi pendidik untuk jenjang SMP sebesar 97,3% merupakan lulusan D4/S1 dan baru tersertifikasi sebesar 25,3% (Lihat gambar 6). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernhard et al. (2024) serta Siagian dan Artha (2023) bahwa kualitas pendidik akan berdampak positif pada kinerja siswa yang pada akhirnya akan membawa pengaruh pada angka partisipasi sekolah.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (2024)

Gambar 6. Perbandingan Kualifikasi Pendidik Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

2) Belanja Pegawai pada Tingkat Kabupaten/Kota berpengaruh langsung terhadap Angka Partisipasi Murni di tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), daripada di tingkat pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas). Hal ini sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pendidikan terbagi menjadi pendidikan dasar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pendidikan menengah dan luar biasa pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Sebaliknya, belanja barang dan jasa fungsi pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap APM SMP. Secara ekonomis, hasil ini mengindikasikan bahwa belanja barang dan jasa seperti pengadaan alat tulis, kegiatan operasional sekolah, atau jasa pendukung lainnya, lebih berperan dalam menjaga kelangsungan operasional pendidikan, namun belum secara langsung mendorong peningkatan partisipasi sekolah. Hal ini dimungkinkan karena belanja jenis ini cenderung bersifat rutin dan tidak secara spesifik ditujukan untuk mengatasi hambatan utama partisipasi sekolah, seperti keterbatasan akses atau ketimpangan distribusi layanan pendidikan antar wilayah.

Belanja modal fungsi pendidikan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap APM SMP. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan atau pengadaan aset fisik pendidikan, seperti gedung dan sarana prasarana sekolah, belum secara langsung berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah dalam jangka pendek. Mengingat belanja modal umumnya memiliki dampak jangka panjang, ketidaksignifikanan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa manfaat belanja modal pendidikan baru akan dirasakan setelah periode waktu tertentu atau ketika diikuti dengan dukungan belanja operasional dan sumber daya manusia yang memadai.

Selanjutnya, belanja hibah fungsi pendidikan juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap APM SMP. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik belanja hibah yang bersifat tidak rutin dan tidak merata antar kabupaten/kota. Selain itu, hibah pendidikan sering kali diarahkan untuk mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan tertentu, seperti sekolah swasta, sehingga dampaknya terhadap peningkatan partisipasi sekolah secara agregat di tingkat daerah relatif terbatas.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik bidang pendidikan serta kemiskinan yang dimasukkan sebagai variabel kontrol tidak menjadi fokus utama pembahasan, namun keberadaannya penting untuk mengendalikan pengaruh pendanaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sosial ekonomi masyarakat. Dengan mengendalikan DAK dan kemiskinan, hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh belanja fungsi pendidikan daerah terhadap APM SMP lebih merefleksikan kebijakan penganggaran yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Hasil ini sejalan dengan teori keuangan publik maupun hasil kajian empiris di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Haikal dan Rahmadiani (2025) bahwa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pengalokasian belanja fungsi pendidikan dapat mempengaruhi pemenuhan layanan dasar pendidikan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas belanja fungsi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh struktur dan prioritas alokasinya. Dominannya peran belanja pegawai dalam meningkatkan APM SMP mengindikasikan bahwa kebijakan penganggaran pendidikan daerah perlu lebih memperhatikan aspek ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, belanja

barang dan jasa, belanja modal, dan belanja hibah perlu dievaluasi kembali agar lebih terarah pada upaya mengatasi hambatan partisipasi sekolah, khususnya di daerah dengan capaian APM yang masih rendah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja fungsi Pendidikan berdasarkan jenis belanja terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat pada periode 2022-2024. Dengan menggunakan analisis data panel pada tingkat kabupaten/kota dan mengendalikan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan serta kemiskinan, penelitian ini menekankan pentingnya komposisi belanja pendidikan daerah dalam menentukan capaian partisipasi sekolah. Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak seluruh jenis belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh yang sama terhadap peningkatan APM SMP.
2. Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan dan keberlanjutan pembiayaan tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam mendorong partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.
3. Jenis belanja lainnya, seperti: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Hibah tidak memiliki peran yang signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pendidikan yang bersifat operasional, fisik, maupun tidak rutin belum secara langsung berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah dalam jangka pendek.
4. Secara simultan, Belanja Fungsi Pendidikan memiliki peran yang signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyediakan Layanan Pendidikan Dasar melalui Belanja Fungsi Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong angka partisipasi sekolah.

Saran

Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, Pemerintah Daerah di Jawa Barat perlu melakukan evaluasi atas pengalokasian belanja fungsi pendidikan. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan kualitas dan arah alokasi belanja pendidikan, tidak hanya berfokus pada pemenuhan besaran anggaran pendidikan saja. Penguatan belanja pegawai perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap efektivitas belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja hibah agar lebih terarah pada pengurangan hambatan partisipasi sekolah. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengalokasian belanja fungsi pendidikan antara lain:

- a. Pengalokasian Belanja Modal dengan memprioritaskan infrastruktur dasar pendidikan di daerah terpencil. Penguatan infrastruktur dasar, seperti: ruang kelas, kursi dan meja serta fasilitas sanitasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Agyei et al., 2024).
- b. Pengalokasian Belanja Barang dan Jasa dengan memprioritaskan standarisasi dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Standarisasi dalam sertifikasi kualifikasi pendidikan berkontribusi dalam membentuk kualitas supply tenaga pendidik (Sarangapani et al., 2025). Lebih lanjut, menurut Chang et al., (2014), tenaga pendidik membutuhkan pelatihan berkelanjutan melalui pendampingan *in-service training and coaching* dibandingkan pelatihan formal jangka pendek. Oleh karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan masyarakat menjadi penting dalam program-program pengembangan kompetensi guru, seperti: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), KKN Pendidikan dan Kemitraan Sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023).

- c. Pengalokasian Belanja Pegawai dengan memprioritaskan insentif bagi tenaga pendidik yang kompeten dan tenaga pendidik yang ditempatkan di daerah terpencil. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan. Chang et al. (2014) menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi akan berjalan efektif bila disertai insentif keuangan dan manfaat pekerja (*employee benefit*) lainnya, seperti: perumahan dan jaminan keamanan.

Penelitian ini dilakukan terbatas pada konteks kuantitatif data belanja pemerintah daerah saja baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer daerah (Dana Alokasi Khusus). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini belum sepenuhnya menangkap dimensi non-fiskal dalam penyelenggaraan pendidikan yang berpotensi memengaruhi Angka Partisipasi Murni. Indikator-indikator pendidikan lainnya yang saling terkait, seperti: jumlah rombongan belajar, jumlah tenaga pendidik, maupun jumlah satuan pendidikan yang secara teoritis berkaitan langsung dengan kapasitas layanan pendidikan, belum dimasukkan sebagai faktor pendukung lainnya. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya, salah satu yang dapat dilakukan untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Murni, perlu juga mengoperasionalisasi indikator-indikator tersebut sebagai variabel pengendali. Ke depan, penelitian lanjutan dapat juga dilakukan untuk mengkaji dampak jangka panjang belanja modal pendidikan serta memasukkan variabel kualitas pendidikan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas belanja pendidikan daerah. Selain itu, penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggali secara mendalam dinamika kebijakan dan praktik penganggaran pendidikan di tingkat daerah. Penggunaan metode *mixed method* dengan menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif melalui wawancara terstruktur juga dapat dilakukan untuk memperoleh kajian yang lebih mendalam atas faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyei, E.A, Annim, S.K, Acquah, B.Y, et al. (2024). Education Infrastructure Inequality and Academic Performance in Ghana. *Heliyon* 10 (2024) e34041. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34041>
- Aulia, M.R & Yulhendri. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Ecogen Vo.3, No.5, 5 Maret 2020*, Page 155-164.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Pendidikan 2025*. Volume 14, 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bernhard, R., McDermott, T., Hasenhuttl, C., Burn, K., & Sammons, P. (2024). A Focus on Quality of Teaching in Schools Increases Students Progress of Attainment. Evidence from English Secondary Schools. *School Effectiveness and School Improvement*, 2024, Vol35, No.4, 506-530. <https://doi.org/10.1080/09243453.2024.2398601>
- Beri, P.B, Cochrane, L & Fazlullah, S.S., (2025). Public Spending and Primary School Enrolment: An Autoregressive Distributed Lag Approach. *Education Policy Analysis Archives*, 33(24). <https://doi.org/10.14507/epaa.33.8690>
- Bui, T.A et al., (2020). The Effect of Tuition Fee Reduction and Education Subsidy on School Enrolment: Evidence from Vietnam. *Children and Youth Services Review* 108 (2020) 104536. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104536>
- Chang, M.C, Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., et al. (2014). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- Gruber, J. (2019). *Public Finance and Public Policy 6th ed*. New York: Worth Publisher.

- Musgrave, R.A & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. International Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Haikal, I & Rahmadiani, L.F. (2025). Efektivitas Mandatory Spending Tagging Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(1). p. 59-78.
- Hajebi, E., Billing, C. & Hajebi, M. (2023). The Effect of Government Expenditure on Education on the Enrolment Rate of Different Education Levels in Selected OECD Countries. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 11(5):2783-2795. <https://doi.org/10.18535/IJSRM/V11I05.EL03>
- Hota, S. P. (2023). Education Infrastructure, Expenditure, Enrolment and Economic Development in Odisha, India. *International Journal of Educational Development* 103 (2023) 102903. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102903>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Ruwandari, N.D & Suharlina, H. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (SD, SMP, SMA) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 6, 2023*.
- Siagian, R. & Artha, B. (2023). The Influence of Teacher Quality, Teacher Characteristics and Teaching Experience on School Quality that Impacts Student Performance in Bandung: Evidence from High School. *Jurnal Pendidikan West Science Vol.1, No.03, Maret 2023, pp.184-192*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Yanti, A.T, Imtikhanah, S & Fatah, K. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Jumlah Guru, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah. *Jurnal Neraca Volume 19 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2023*.